

## DAFTAR ISI

<b>Dr. Rusdi. M.Hum</b>	Konflik Pertanahan Antara Petani dengan Puskopad (Pusat Koperasi Angkatan Darat) TNI-AD di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.....	<b>4</b>
<b>Dra. Amanah Agustin. M.Hum</b>	Revolusi Mental Melalui Pendidikan Membatik Di Sekolah Dengan Motif Arca Singosari.....	<b>18</b>
<b>Ferdinan Bashofi. M.Pd</b>	Dinamika Politik Lokal; Sebuah Kajian Gerakan Mahasiswa 98 dan Perkembangan Politik Pasca Orde Baru di kota Malang.....	<b>27</b>
<b>Dany Miftahul Ula, M.Si</b>	Makna <i>Smartphone</i> Bagi Pelajar.....	<b>37</b>
<b>Irvan Lestari. M.Hum</b>	Sejarah Manusia Purba di Antara Kontroversi, Penolakan, dan Penerimaan.....	<b>54</b>
<b>Tatik Widayawati.S.Pd Puspita Pebri Setiani. M.Pd</b>	Metode <i>Fiel-Trip</i> Dalam Menumbuhkan Kepedulian Siswa terhadap Peninggalan Sejarah Bukti-Bukti Kehidupan Pengaruh Hindhu Budha Yang Masih Ada Pada Saat Ini.....	<b>69</b>
<b>Debi Setiawati, M.Pd</b>	<i>Slametan</i> Dalam Spritualisme Orang Jawa Pada Masa Lalu Sampai Sekarang.....	<b>76</b>
<b>Fatmawati, M.Si</b>	Kajian Kritis Terhadap Media Sosial Sebagai “Tuhan Kedua” Bagi Para <i>Netizen</i> .....	<b>89</b>
<b>Septa Rahadian, M.Pd</b>	Pembelajaran Sejarah Malang Raya Berbasis <i>Contextual Teaching And Learning</i> .....	<b>99</b>
<b>Faizal Kurniawan, M.Si</b>	<i>Lejong Tau</i> Dalam Perspektif Dialektis Relasional.....	<b>108</b>

## **DINAMIKA POLITIK LOKAL; SEBUAH KAJIAN GERAKAN MAHASISWA 98 DAN PERKEMBANGAN POLITIK PASCA ORDE BARU DI KOTA MALANG**

**Ferdinan Bashofi. M. Pd**  
IKIP Budi Utomo Malang  
Febasfi@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dalam Negara yang manganut demokrasi partisipasi masyarakat dalam dunia politik tentunya merupakan sebuah keharusan, banyak partisipasi masyarakat timbul dengan mengambil bentuk dan sifat yang bermacam-macam, di Indonesia partisipasi masyarakat dapat kita lihat pada pemilu, sedangkan pada masa orde baru bisa dikatakan partisipasi semu, barulah geliat masyarakat muncul dengan wajah gerakan mahasiswa dan setelah itu pemilu pada masa transisi demokrasi.

Sejarah perkembangan Gerakan Mahasiswa (GM) di Indonesia selalu menarik karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Bahkan, keberadaan GM selalu berpengaruh pada situasi politik nasional. Meskipun sudah berkali-kali "diberangus" oleh penguasa di setiap jamannya, GM selalu muncul dengan sikap kritis dan tuntutan untuk memperbaiki keadaan politik nasional. sistem perpolitik Soeharto yang berlandaskan pada kultur jawa membawa pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia partisipasi masyarakat sangat minim. Sikap otoritarian yang sesuai dengan konsep raja jawa membawa pengaruh buruk terlebih lebih saat masalah masalah dalam negeri tidak bisa di atasi dengan baik. Ketika keinginan keinginan untuk menyampaikan suara dibatasi rakyat Indonesia terutama golongan muda yakni para mahasiswa mulai menunjukkan perangai melawan pemerintah yang pada puncaknya mei 1998, yang tersebar di beberapa kota pendidikan di Indonesia salah satunya adalah Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan. Di kota Malang mahasiswa mulai membentuk organisasi organisasi seperti : Forstep FKMM, FKSMPT, dan KMM yang nantinya mulai melakukan aksi aksi menentang rezim Soeharto.

Dengan runtuhnya rezim Soeharto. Terbukalah angin segar dalam melakukan demokrasi di Indonesia. Pemilu 1999 dilaksanakan di Indonesia dan khususnya di Kota Malang pemilu dilakukan dengan hasil yang cukup signifikan yakni partai Golkar tersisihkan oleh PDI-P, dimana partai ini mengidentifikasi diri sebagai partai wong cilik.

**Kata Kunci:** *Politik, Kota Malang, Gerakan Mahasiswa 1998, dan Pemilu 1999*

## **A. Pendahuluan**

Setelah rezim otoriter runtuh, agenda utama yang dilakukan oleh negara-negara yang mengalami transisi demokrasi adalah melembagakan partisipasi politik rakyat dalam bentuk membuka ruang keterlibatan dan keterwakilan rakyat secara luas dalam lembaga politik yang ada.

Peran serta masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi semakin penting bersamaan dengan kemajuan teknologi dibidang komunikasi dan transportasi sekarang ini. Rakyat secara mudah dalam jarak yang cukup jauh dapat mengikuti proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. Pada gilirannya, hal ini membawa dampak pada sistem dan cara kerja lembaga perwakilan rakyat serta tata cara penyusunan kebijakan pemerintah.

Hak-hak istimewa rakyat seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam lembaga-lembaga politik yang ada (pemilu), diberikan ruang yang lebar. Dengan melihat rangkaian peristiwa yang ada dalam sejarah Indonesia tentunya kita akan mampu menropong dinamika yang ada baik itu dalam skala nasional maupun dalam skala lokal.

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia adalah gerakan mahasiswa di tahun 1998 yang setidaknya mampu mengantarkan Indonesia ke jalan demokrasi, walaupun tidak semulus yang

diharapkan, dalam mengkaji peristiwa tersebut dalam perspektif perubahan sosial penulis sendiri menggunakan teori konflik Dahrendorf sebagai kerangka penulisan.

Paska reformasi 1998, dinamika politik di Indonesia masih berkecamuk di antar daerah, kota Malang sebagai kota pendidikan tentunya juga tidak luput dari dinamika tersebut, baik itu keikutsertaan dalam gerakan mahasiswa maupun peran masyarakat Malang dalam dunia politik. Perubahan yang cukup signifikan dalam dunia politik paska rezim Soeharto, tentunya tidak lepas dari faktor-faktor pendorong perubahan itu sendiri, disini penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Orgburn, bahwa perubahan yang terjadi disebabkan oleh peran teknologi, yang lebih khususnya dalam tulisan ini peran teknologi dalam penyebaran informasi.

## **B. Partisipasi Masyarakat Dalam Dunia Politik**

Dalam ilmu politik disebutkan bahwa "partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik" S.P. Huntington dan Joan, ini berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam masyarakat tradisional keikutsertaan masyarakat dalam politik hanya terbatas pada golongan elit politik saja. Dalam masyarakat modern keikutsertaan rakyat dalam politik dan urusan pemerintah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Rakyat tidak lagi melihat pemerintah sebagai urusan "orang

lain” yang secara kebetulan mempunyai kewenangan dan hak untuk mengatur masyarakat. Mereka melihat pemerintah sebagai urusan mereka sendiri, sebagai bagian dari kehidupan mereka. Kesadaran demikian muncul sebagai konsekuensi dari beberapa sebab. Pertama, munculnya kesadaran pada tiap individu sebagai anggota atau bagian dari masyarakat bahwa manusia hidup tidak sekedar sebagai orang seorang atau individu, tetapi juga sebagai salah satu anggota dari masyarakatnya. Sebagai individu, orang bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya, tetapi sebagai anggota masyarakat tiap tindakannya mempunyai akibat pada orang lain. Demikian juga tindakan orang lain mempunyai akibat pada dirinya. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, sesuatu yang dibuat oleh yang berwenang (pemerintah) membawa akibat pada kehidupan seluruh individu dalam masyarakat. Ketiga, adanya kesadaran tentang demokrasi dalam masyarakat modern yang menganggap “pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” sebagai suatu sistem yang benar. Sebab itu kebijakan yang dibuat pemerintah harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keikutsertaan rakyat dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan, mulai dari perumusan, pelaksanaan sampai pada penilaian kebijakan (Abidin. 2004)

Dalam praktek, banyak partisipasi masyarakat timbul dengan mengambil bentuk dan sifat yang bermacam-macam. Namun, tidak semua gerakan masyarakat dapat dianggap partisipasi masyarakat. Huntington membatasi partisipasi masyarakat sebagai kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sipil (bukan aparat pemerintah) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, peran serta baru dapat dikatakan suatu partisipasi kalau sudah berupa kegiatan, bukan sekedar suatu sikap. Suatu sikap yang tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan belum dapat dikategorikan sebagai partisipasi. Dan ini juga bukan partisipasi masyarakat kalau tidak bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Peran serta masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah menjadi semakin penting bersamaan dengan kemajuan teknologi dibidang komunikasi dan transportasi sekarang ini. Rakyat secara mudah dalam jarak yang cukup jauh dapat mengikuti proses perumusan dan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah. (Abidin. 2004)

Pengaruh lebih jauh dari perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi ini adalah adanya pengaruh kebijakan yang mendunia (global). Pengaruh satu kebijakan pada kehidupan tidak lagi terbatas hanya pada pengaruh dari kebijakan pemerintah suatu

negara pada rakyatnya, akan tetapi juga turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah negara lain. Pengaruh yang begitu besar dari perkembangan teknologi juga terlihat pada bentuk pengaruh dari suatu kebijakan yang tidak sekedar bersifat lintas negara dan lintas benua, tetapi juga bersifat lintas sektor dan aspek. Perubahan politik yang terjadi pada pagi hari di suatu negara di suatu benua, dapat membawa dampak pada sore hari yang sama di negara lain di benua lain dalam bidang ekonomi. Sebagai konsekuensi dari keadaan ini, maka peran serta masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat mengambil bentuk yang makin canggih. Pada taraf ini peran media massa dan media elektronik dalam keseluruhan proses kebijakan itu menjadi amat penting. Media massa dapat berperan menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, memunculkan suatu isu dari pihak masyarakat, menggiringnya masuk dalam agenda kebijakan dan mempengaruhi proses perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasannya oleh masyarakat. (Abidin. 2004)

### **C. Gerakan Mahasiswa 1998 dan runtuhnya Orde Baru**

Huru hara Mei 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang telah membawa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa, dimana peristiwa ini tidak bisa

dipisahkan dari rangkaian krisis moneter yang telah berlangsung sejak Juli 1997 di mulai dari Thailand dan menyebar ke beberapa Negara lain termasuk Indonesia dan Korea Selatan. (Zon. 2004)

Diskusi mengenai GM mahasiswa di Indonesia penuh dengan dinamika, karena selalu mengalami perubahan karakter dan bentuk pada setiap zamannya. Soewarsono (1999) menyebut bahwa sejarah awal Indonesia moderen tentang GM memiliki empat "tonggak", yaitu "angkatan 1908", "angkatan 1928", "angkatan 1945" dan "angkatan 1966". Selanjutnya, Soewarsono menyebut bahwa keempat angkatan tersebut adalah generasi-generasi dalam sebuah "keluarga", yaitu sebuah catatan-catatan prestasi "satu generasi baru" tertentu.

Masing-masing dari keempat angkatan di atas memiliki bentuk dan karakter serta relasi-relasi dengan kelompok yang lain yang khas dibanding angkatan-angkatan yang lain. Namun, tidaklah dapat dikatakan bahwa tiap-tiap angkatan tersebut selalu membawa perubahan dan kemajuan bagi zamannya. Tetapi, tiap-tiap angkatan tersebut dapat pula menjadi pengekor atau epigon yang menerima melalui pewarisan. (Soewarsono. 1999)

Dengan demikian, diskusi mengenai GM di Indonesia, tidak selalu berbicara mengenai perubahan yang positif, tetapi juga dapat sebaliknya. Hal ini tergantung dengan

konteks situasi dan relasi-relasi yang dibangun oleh GM itu sendiri.

Selain keempat angkatan tersebut, terdapat satu angkatan generasi lagi yang paling mutakhir dan sangat berpengaruh tidak hanya pergantian politik kekuasaan saja, tetapi juga pada proses demokratisasi di Indonesia, yaitu "angkatan 1998". Pada angkatan ini, GM telah berhasil menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, GM juga mempengaruhi munculnya wacana demokratisasi dan *civil society*. Meskipun demokrasi dan *civil society* secara relatif belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam realitas politik di Indonesia, namun peran GM telah menyebabkan proses-proses tersebut dapat dimulai.

"angkatan 1998". Pada angkatan ini, GM telah berhasil menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, GM juga mempengaruhi munculnya wacana demokratisasi dan *civil society*. Meskipun demokrasi dan *civil society* secara relatif belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam realitas politik di Indonesia, namun peran GM telah menyebabkan proses-proses tersebut dapat dimulai.

Dalam mengkaji peristiwa yang terjadi pada Mei 1998 dapat juga kita kaji menggunakan teori konflik, dimana teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap

disintegrasi dan perubahan. (Ritzer.2004) Hal itu dapat kita lihat ditahun 1998 dimana mahasiswa dan warga sipil mencoba melakukan perubahan terhadap pemerintahan yang dianggap sudah tidak lagi memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Teori yang aplikasikan adalah teori konflik yang dikemukakan oleh *Dahrendorf*. Bahwa teori Dahrendorf melakukan kombinasi antara fungsionalisme (tentang struktur dan fungsi masyarakat) dengan teori (konflik) antar kelas sosial. Teori sosial Dahrendorf berfokus pada kelompok kepentingan konflik yang berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi di samping tentu saja berusaha melakukan berbagai usaha untuk menstrukturkan konflik itu sendiri, mulai dari proses terjadinya hingga intensitasnya dan kaitannya dengan kekerasan. Jadi bedanya dengan fungsionalisme jelas, bahwa ia tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang tetap/statis, namun senantiasa berubah oleh terjadinya konflik dalam masyarakat.

Dalam menelaah konflik antara kelas bawah dan kelas atas misalnya, Dahrendorf menunjukkan bahwa kepentingan kelas bawah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada. Kepentingan antara dua kelas yang berlawanan ditentukan oleh sifat struktur otoritas dan bukan oleh orientasi individu pribadi yang terlibat di dalamnya. Individu tidak harus sadar akan kelasnya

untuk kemudian menantang kelas sosial lainnya.

Dari teori yang dikemukakan Dahrendorf sudah nampak bahwa kepentingan konflik berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi dan Dahrendorf menunjukkan bahwa kepentingan kelas bawah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa tekanan yang diterima masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa membuat mereka menantang legitimasi pemerintahan.

Peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah GM 1998 adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), Dr. Daoed Joesoef. Nomor: 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan ini dianggap telah mematikan GM karena membebani mahasiswa dengan serangkaian kewajiban kuliah dan melarang kegiatan politik di kampus. Pada intinya kebijakan ini adalah menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya organisasi mahasiswa yang selama ini merupakan sarana demokratis mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan mahasiswa. (Harahap & Basril. 1999). Sebelumnya, lembaga kemahasiswaan merupakan sarana untuk menentang kebijakan pemerintah maupun perguruan tinggi. Dengan dibubarkannya lembaga pemerintahan kampus, pemerintah

Orde Baru berharap GM tidak lagi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi politik.

Dikeluarkannya kebijakan NKK ini merupakan respon pemerintah atas serangkaian peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh GM pada tahun 1973-1978. Terutama setelah peristiwa Malapetaka 17 Januari 1974 (Malari 1974), GM diawasi secara ketat.

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 028/1974 yang dianggap membatasi aktivitas GM. Antara tahun 1975-1976, protes yang dilakukan oleh GM terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru sedikit mereda. Namun, setelah pemilu tahun 1977, gelombang aksi meningkat lagi. Di Jakarta, mahasiswa UI kembali melakukan aksi memprotes pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak adil, karena pihak birokrasi dan militer dianggap memihak ke Golkar. Mereka menganggap tidak sah dan menolak kemenangan Golkar pada pemilu 1977. Aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah, misalnya di Bandung, mahasiswa ITB membentuk Gerakan Anti Kebodohan (GAK), di Yogyakarta, mahasiswa UGM mengusung "keranda matinya demokrasi", bahkan di Surabaya, sejumlah mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Pada akhir tahun 1980-an, GM ditandai dengan tumbuhnya komite-komite rakyat yang menjadi bentuk organ dan jaringannya. Antar kelompok GM di berbagai

kota saling berkomunikasi dan saling mengunjungi untuk membangun solidaritas. Krisis ekonomi yang menghantam di Indonesia dan beberapa negara Asia telah menjadi momen yang penting bagi munculnya GM turun ke jalanan. Dan disisi lain kelompok GM yang baru seperti Forkot, dan kelompok mahasiswa ekstra kampus semakin aktif turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi dan pergantian kekuasaan. Mereka ini secara maraton dari pertengahan 1997 hingga Mei 1998 terus menerus melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota.

Seperti efek bola salju, aktivis-aktivis mahasiswa Kota Malang juga tidak mau ketinggalan dengan rekan-rekannya di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Ujung Pandang, Surabaya dan kota-kota besar lainnya, untuk memelopori perubahan di banyak bidang khususnya sosial politik. Sebagai dampak dari aktivitas gerakan mahasiswa tahun 1998 tersebut, di Kota Malang telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam internal dunia mahasiswa sendiri maupun di ranah sosial politik tataran local bahkan nasional. (Soemarsono.2009)

Secara lebih rinci gerakan gerakan mahasiswa yang bermunculan di kota Malang adalah sebagai berikut :

#### 1. Forum Studi Ekonomi Politik ( Forstep )

Menurut Dardiri, Forstep merupakan wadah berkumpul aktivis mahasiswa Yang berlatar

belakang GMNI, PMII, PII, dan aktivis lainnya yang dideklarasikan pada tahun 1996. Pada angkatan pertama forum yang bermarkas di Jl Pisang Kipas 65 Malang ini diinisiasi oleh Sumrambah, Dardiri, Subhan, Abdul Hamid, Joko, Fadilah Putra, Aris Bangkok, Handoko, Rudi, Dedi Tumo dan lain-lain. Pada generasi berikutnya digawangi oleh Lutfi Bahtiar, Setyono, Yahya, Ni'mah dan Andik. Forstep merupakan forum diskusi yang menjadi salah satu dapur gerakan mahasiswa di Malang. (soemarsono.2009)

#### 2. Forum Komunikasi Mahasiswa Malang ( FKMM )

Adalah forum komunikasi yang melibatkan aktivis mahasiswa dari semua kampus di Malang seperti ITN, Unibraw, Unisma, Unmuh, Uniga, dan IKIP Negeri Malang. Digawangi oleh Joko Gundul, Farid, Meizir, Kasiyaman, Teguh, Nana, Basuki, Daker, Wating, Den Hoo, Badrus dan lain-lain. FKMM aktif dalam memprakarsai aksi-aksi demonstrasi pada tahun 1997 dan 1998. pada akhirnya organisasi ini melebur dengan organisasi-organisasi senafas yang lain dan membentuk organisasi nasional bernama Front Perjuangan Pemuda Indonesia 60 (FPPI).

#### 3. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi ( FKSMPT )

Muhamad Ali Akbar ( Koordinator Senat Mahasiswa se Malang tahun 1998 ) dalam

wawancara pada 16 Mei 2009 menjelaskan bahwa FKSMPT adalah wadah pergerakan semua elemen Senat Mahasiswa se Malang, diantaranya adalah : ITN, Unibraw, Unmuh, IKIP Negeri Malang, Unmer, IAIN, Unisma, STIBA, UWG, Uniga, STTM, STIEKN Jayanegara, ISTP, STIE Malangkucecwara / ABM dan lain-lain. Menurutnya elemen gerakan di Malang ada 4 yaitu gerakan mahasiswa, gerakan kaum intelektual menengah, gerakan LSM dan gerakan Ormas. Untuk gerakan mahasiswa terpolarisasi menjadi beberapa bentuk, akan tetapi seringkali bertemu dalam program aksi di lapangan. FKSMPT bermarkas di jalan Bendungan Sempor IIIA serta mengadakan konsolidasi di kantor senat IKIP, Unibraw, ITN, Unmuh, dan Uniga. Jargon daripada FKSMPT adalah : "Polisi adalah lawan dalam setiap aksi" serta "Masyarakat saat ini sudah mati dan beku dalam gundukan es kekuasaan yang represif ". Aktor gerakan dari FKSMPT diantaranya adalah Julio Thomas Pinto, ketua umum senat mahasiswa Unmuh yang berasal dari kader IMM. Sekarang menjadi menteri pertahanan Timor Leste.(Soemasono.2009)

#### 4. Komite Mahasiswa Malang (KMM)

Menurut Ratmoko dalam wawancara pada tanggal 15 Mei 2009, elemen gerakan yang massif pada tahun 1998 adalah Komite Mahasiswa Malang (KMM), yaitu wadah pergerakan mahasiswa Malang lintas

kampus yang bermarkas di Universitas Widyakarya. Mayoritas anggotanya berasal dari mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang.

Mulai bulan April 1998 KMM sering menggelar aksi massa menuntut reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi Presiden. Sejak tanggal 14 – 20 Mei 1998 aktivis KMM setiap hari menggelar aksi heroik di depan kampus Widyakarya. KMM merupakan gabungan dari beberapa komite mahasiswa ditingkat kampus seperti komite mahasiswa Universitas Gajayana, Komite Mahasiswa Universitas Widyagama, Komite Mahasiswa Universitas Widyakarya, Komite Mahasiswa Cipta Wacana, Komite Mahasiswa Malang Kucecwara di STIKEN Jayanegara, dll. Dalam setiap aksinya KMM membawa isu nasional seperti tuntutan mencabut Dwifungsi ABRI, Turunkan Soeharto dan Cabut Lima Paket UU Politik. Target aksi KMM seringkali mendatangi Makorem dan Makodim selain balai kota Malang dan gedung DPRD kota Malang.

Pada awal 1998 di Malang telah ditetapkan jam malam untuk menjaga ketertiban masyarakat (bahasa lain membungkam gerakan mahasiswa). Semua tempat dan instalasi strategis dijaga ketat oleh aparat keamanan, termasuk pusat-pusat perbelanjaan dan rumah ibadah. Semua sayap ABRI dikerahkan untuk siaga dalam menghadapi aksi gerakan mahasiswa. Pada saat menjelang tahun 1998 terjadi

kesepakatan antara elemen gerakan mahasiswa dengan aparat kepolisian yaitu :

- tidak ada kerusuhan dan kriminalitas politik di wilayah Malang Raya
  - semua aktivis tidak ada yang ditahan lebih dari 2 hari
  - pada saat aksi aktivis tidak akan melempar aparat dengan batu
  - kelompok mahasiswa anti NKRI dipersilahkan untuk ditangkap jika sewaktu waktu aksi.
- (Soemasono.2009)

Pada tanggal 20 Mei 1998 memperingati Hari Kebangkitan Nasional terjadi aksi massa yang diikuti oleh ribuan orang di stadion luar Gajayana. Aksi massa yang melibatkan seluruh elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Malang ini bergabung dengan elemen masyarakat yang lainnya termasuk massa pendukung Partai Demokrasi Indonesia ( PDI ) Pro Megawati Sukarnoputri. Elemen mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini adalah Komite Mahasiswa Malang (KMM) dan Gempar ( berbasis kuat di Unisma ) serta elemen-elemen gerakan dari segenap kampus yang ada di Malang.

Selain di stadion luar Gajayana, aksi pada tanggal 20 Mei 1998 juga berlangsung di bunderan veteran. Aksi ini diikuti oleh sekitar 15.000 mahasiswa, massa meluber mulai dari depan kampus ITN hingga Taman

Makam Pahlawan belakang kampus IKIP Malang. Keesokan harinya padam tanggal 21 Mei 1998 aksi demonstrasi digelar di tempat yang sama. Sekitar 100 orang aktivis sudah terlihat berkepala plontos alias cukur gundul, mengingat detik-detik kejatuhan Soeharto sudah semakin dekat. Setelah Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi, massa mahasiswa langsung long march dari bunderan veteran ke Taman Makam Pahlawan Suropati.

#### **D. Perkembangan Politik Di Malang Pasca Rezim Soeharto**

Pemilu 1999 yang dilaksanakan di Malang memiliki warna yang tak jauh berbeda dengan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Kota Malang merupakan salah satu basis dari partai yang cukup eksis dimasa Soeharto yakni PDI-P dari pemilu 1999 yang dilaksanakan di kota Malang dapat diperoleh prosentase jumlah suara sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan suara
1	PDI-P	509.857
2	PKB	397.382
3	GOLKAR	244.097
4	PPP	45.87
5	PAN	39.549

sumber : data KP Provinsi Jawa Timur

Lahirnya PDI-P di kota Malang tidak lepas dari kasus penyerbuan kantor DPP PDI-P yang dilakukan oleh Orde baru dalam

rangka menggulingkan kepemimpinan Megawati dalam Partai. Dengan mengidentifikasikan diri dengan partai “wong cilik” partai ini mampu menarik hati masyarakat Malang. Identifikasi sebagai partai wong cilik mengingatkan masyarakat setempat dengan gerakan massa marhaen. Yang digagas oleh Soekarno yang nota bene adalah ayah dari Megawati selaku ketua DPP PDI-P.

Militansi masyarakat Malang terhadap partai ini dibuktikan dengan perolehan jumlah suara yang cukup signifikan pada partai berlambang kepala banteng bulat ini pada pemilu 1999. figur Soekarno dan identifikasi sebagai partai kaum tertindas mampu mengantarkan partai ini menundukkan lawan politiknya di Malang yang sama sama mengusung paham marhaenisme yakni PNI supeni dan PNI Marhaen.(Haris.2004)

Namun demikian, keberhasilan PDI-P dengan identifikasi tersebut tidak bisa dirasakan dalam kurun waktu yang lama, segera setelah kemenangan yang cukup signifikan di pemilu 1999, hal ini dikarenakan citra partai Wong Cilik yang dibentuk oleh ketidak sengajaan proses politik otoritarian orde baru. Para politisi PDI-P tidak secara jelas memberikan lampiran ideology terhadap warna politik PDI-P kecuali melalui mitos politik lama yang sengaja dibiarkan berkembang mengenai Megawati sebagai puteri bung Karno, sebagai ratu adil.

Dengan politik semacam itu jelas PDI-P tidak mempunyai kerangka rekrutmen politik rakyat, dan apa yang dibiarkan oleh partai tersebut adalah bentuk eksklusivitas rakyat kedalam politik patronase.(Haris.2004)

Walaupun hal hal diatas selalu menghantui namun massa PDI-P tetap eksis menyumbangkan suaranya dalam berbagai kegiatan pemilu. Bahkan dapat kita lihat partai ini mampu mengantarkan kadernya yakni Peni Suparto untuk kedua kalinya duduk dikursi pemeritahan walikota secara berturut turut. Dan hasil pemilu 2004 juga menunjukkan hasil yang masih sama dengan tahun 1999 yakni PDI-P masih berada diurutan paling atas, walaupun jumlah prosentase suara yang diperoleh menurun, hal itu dikarenakan bermunculannya partai – partai baru yang diikuti oleh perkembangan media massa yang cukup besar sehingga masyarakat mulai dapat berperan aktif dalam mengikuti jalannya pemilu.

Dapat kita lihat munculnya partai baru yakni Demokrat yang suaranya mampu mendokrak laju susilo bambang yudoyono menjadi orang nomor satu di indonesia. Menurut beberapa sumber fenomena kemenangan partai demokrat tidak lepas dari figur susilo bambang yudoyono. Popularitas SBY sebagai Tokoh mirip dengan tokoh Gus Dur dan Megawati dua orang presiden sebelumnya, mereka menjadi tokoh karena reproduksi media yang terus menerus.

## E. Kesimpulan Dan Saran

Sejarah perkembangan Gerakan Mahasiswa (GM) di Indonesia selalu menarik karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Bahkan, keberadaan GM selalu berpengaruh pada situasi politik nasional. Meskipun sudah berkali-kali "diberangus" oleh penguasa di setiap jamannya, GM selalu muncul dengan sikap kritis dan tuntutan untuk memperbaiki keadaan politik nasional. sistem perpolitik Soeharto yang berlandaskan pada kultur jawa membawa pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia partisipasi masyarakat sangat minim.

Sikap otoritarian yang sesuai dengan konsep raja jawa membawa pengaruh buruk terlebih lebih saat masalah masalah dalam negeri tidak bisa di atasi dengan baik. Ketika keinginan keinginan untuk menyampaikan suara dibatasi rakyat Indonesia terutama golongan muda yakni para mahasiswa mulai menunjukkan perangai melawan pemerintah yang pada puncaknya mei 1998, yang tersebar di beberapa kota pendidikan di Indonesia salah satunya adalah Kota malang yang dikenal sebagai kota pendidikan.

Dengan runtuhnya rezim Soeharto. Pintu menuju Negara demokrasi di Indonesia terbuka lebar. Pemilu 1999 dilaksanakan di Indonesia dan khususnya di Kota malang pemilu dilakukan dengan hasil yang cukup signifikan yakni partai golkar

tersisihkan oleh PDI-P, pemilu 2004 PDI-p juga memperoleh suara terbanyak walaupun dalam segi prosentase berkurang karena kemunculan partai partai baru.

### Daftar Pustaka

- Forrester, Geof. 2002. *Indonesia Paska Soeharto*. Yogyakarta : Tajidu Press.
- Harahap, Muchtar E dan Basril, Andris, 1999, *Gerakan Mahasiswa dalam Politik Indonesia*, Jakarta: NSEAS
- Haris, syamsudin. 2004. *Pemilu langsung ditengah oligarkhi partai: proses nominasi dan seleksi calon*. Jakarta: Gramedia pustaka.
- Ritzer, George. Douglas. 2004. *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Sanit, Arbi.. "Gerakan Mahasiswa 1970-1973: Pecahnya Bulan Madu Politik, dalam Widjojo, Muridan S. (et.al). 1999. *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Sumarsono, Cokro, Wibowo. 2009. *Dinamika Gerakan Mahasiswa : Studi Kasus Gerakan Mahasiswa di Kota Malang Pada Tahun 1998*. Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- Soewarsono, "Prolog: Gerakan Mahasiswa 1998", dalam Widjojo, Muridan S. (et.al), 1999, *Penakluk Rezim Orde Baru, Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Sinar Harapan.

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*.

Jakarta: Yayasan Pancur Siwah

Zon, Fadli. 2004. *Politik Huru-Hara Mei 1998*.

Jakarta: IPS.